

Peranan Polri Dalam Reformasi

Oleh: Brigjen. Pol. Drs. FX Soemardi MA, SH



Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Polri maka peranan Polri di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara telah diatur dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam GBHN 1993 telah dipertegasakan bahwa peranan Polri adalah selaku inti kekuatan

Peran Polri di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagai berikut:

**Peran Sebagai Alat Negara
Penegak Hukum**

petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Penegakan hukum ini dilaksanakan dalam rangka menciptakan ketertiban, keadilan dan kepastian hukum termasuk penjaga moral guna mewujudkan tertib hukum dalam masyarakat. Aktualisasi peran ini adalah:

- a. Menguasai dan mahir dalam hukum acara pidana dan perdata sehingga mampu bersaing secara akademis, sekaligus dapat mengeliminir image negatif masyarakat bahwa Polri hanya mengedepankan kekuasaan serta wewenang belaka.
- b. Mampu mencegah adanya pelanggaran hukum, dengan cara mengintensifkan pembinaan mental prajurit Polri khususnya meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tidak menjadi korban dari kebutaan hukum, atau tindakan sewenang-wenang dan lain-lain.
- d. Mampu memberikan keteladanan dalam penegakan hukum disiplin dan tata tertib secara prima.
- e. Mampu menolak suap atau yang sejenis dan bahkan sebaliknya mampu membimbing dan menyadarkan penyuap untuk melakukan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.



Penegakan hukum dilaksanakan dalam rangka menciptakan ketertiban, keadilan dan kepastian hukum termasuk penjaga moral guna mewujudkan tertib hukum dalam masyarakat.

rasa, demonstrasi, kerusuhan massal, huru-hara sampai pemberontakan atau makar. Untuk peran ini Polri perlu dilengkapi dengan kemampuan penindakan gangguan kamtibmas. Aktualisasi peran ini adalah:

- a. Mampu mengelola sumber daya yang selalu terbatas secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen yang maju dan modern, sehingga dapat mewujudkan tertibnya organisasi, senjata dan peralatan serta pembinaan latihan dan kesiagaan secara terarah dan terpadu guna memberikan nilai guna yang optimal.
- b. Mampu memanfaatkan fasilitas dan peralatan yang berteknologi canggih demi ter-

d. Mampu menguasai manajemen kepolisian secara baik karena pada dasarnya manajemen kepolisian dirancang untuk bekerja pada masa damai dan krisis dengan ditandai adanya kecepatan dan ketepatan di dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dengan perhitungan derajat risiko yang cermat serta dukungan sumber daya yang semakin terbatas.

Peran Sebagai Pengayom dan Pelindung Masyarakat

Peran ini diwujudkan dalam kegiatan pengamanan setiap kegiatan masyarakat, baik yang sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan (asas legalitas) maupun yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada (asas oportunitas yang diwadahi dalam hukum Kepolisian). Untuk melaksanakan peran ini Polri dilengkapi dengan kemampuan-kemampuan penertiban masyarakat, penyelamatan masyarakat

dan pengamanan masyarakat. Aktualisasi peran ini adalah:

- a. Mampu menempatkan diri sejajar dengan masyarakat, tidak arogan dan merasa tidak lebih di mata masyarakat.
- b. Mampu dan mau bekerja keras untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk kesulitan masyarakat.
- c. Mampu melindungi berdasarkan hukum dan bukan sebaliknya melanggar hukum karena interest tertentu.
- d. Mampu mengantisipasi secara dini dalam membentengi masyarakat dari segala kemungkinan yang bakal mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Peran Sebagai Pelayan Masyarakat (Public Service)

Peran ini merupakan kemampuan yang melengkapi segenap aspek pelaksanaan tugas Polri baik pre emtif, preventif maupun represif. Untuk selanjutnya peran ini dalam rangka menjamin ketenteraman, kedamaian dan keadilan masyarakat, sehingga hak dan kewajiban masyarakat terselenggara dengan seimbang, serasi dan selaras. Polri sebagai tempat mengadu, melapor segala permasalahan masyarakat yang mengalami kesulitan sehingga perlu pelayanan dan pertolongan secara ikhlas dan responsif. Aktualisasi peran

Mampu mengantisipasi secara dini dalam membentengi masyarakat



hingga tidak memaksa dan menakut-nakuti serta mengancam dengan kekuasaan.

c. Mampu memberikan pelayanan yang simpatik sehingga memberikan kepuasan bagi yang dilayani.

Peran Sebagai Pembimbing Masyarakat

Peran ini membimbing masyarakat untuk menjadi potensi kamtibmas secara swakarsa sehingga mampu menghadapi ancaman kriminalitas terhadap diri maupun lingkungannya. Tujuannya agar masyarakat lebih memahami dan menyadari akan hak dan kewajibannya di bidang hukum dan sosial serta peran serta masyarakat dalam binkamtibmas. Aktualisasi peran ini adalah:

- Mampu menjadi figur idola sebagai sosok insan Polri yang manunggal dengan rakyat.
- Mampu mewujudkan sikap pengabdian terbaik sehingga gaungnya dapat menarik simpati masyarakat.
- Mampu bersikap arif dan bijaksana sehingga dengan tulus hati secara kohesif mengikuti bimbingan Polri.
- Mampu memiliki predikat konsultan patria yang menjadi tumpuan masyarakat setempat sebagai mobilisator dan fasilitator.



Polri dalam melaksanakan peran ini bukan hanya didudukkan sebagai pejabat pada badan eksekutif

maupun legislatif, akan tetapi kekuatan sospol ini sudah diwarnai setiap langkah dalam pelaksanaan tugas Polri sehari-hari.

mikul tugas dan tanggung jawab dalam menyukseskan perjuangan nasional, melaksanakan pembangunan kesejahteraan masyarakat dan negara. Polri dalam melaksanakan peran ini bukan hanya didudukkan sebagai pejabat pada badan eksekutif maupun legislatif, akan tetapi kekuatan sospol ini sudah diwarnai setiap langkah dalam pelaksanaan tugas Polri sehari-hari. Hal ini dimungkinkan karena setiap aspek pelaksanaan tugas Polri mengontrol kepentingan masyarakat umum, yang selalu bernuansa politik seperti bidang perizinan, pengamanan kegiatan masyarakat, pengawalan VIP/WVIP, pemilu dan sebagainya.

menuju Indonesia baru, tatanan baru dan budaya baru secara konsepsional. Dalam reformasi ini bangsa Indonesia harus belajar sejarah dari berbagai negara yang telah melakukan reformasi dengan segala kegagalan dan keberhasilannya. Tujuannya agar bangsa Indonesia di dalam melakukan reformasi dapat menghindari kegagalan dan dapat menyempurnakan keberhasilan-keberhasilan sehingga mencapai sasaran yang diinginkan. Berdasarkan hal itu maka rekomendasi atau sikap ABRI terhadap reformasi yang sedang dilakukan sekarang ini adalah reformasi yang menyeluruh terutama bidang politik, ekonomi dan hukum untuk menuju cita-cita nasional harus dilaksanakan secara konstitusional, konseptual, gradual, tepat sasaran sesuai dengan urgensinya serta terpadu dan simultan.

Reformasi menyeluruh yang sedang dilaksanakan dewasa ini utamanya adalah bidang politik, ekonomi dan hukum untuk menuju cita-cita nasional. Ketiga bidang reformasi ter-

sebut harus dilaksanakan secara simultan karena adanya saling keterkaitan dan ketergantungan. Penyelesaian masalah bidang politik tidak akan berhasil dengan baik bila kesulitan-kesulitan bidang ekonomi belum dapat diatasi dan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat tidak terjamin. Demikian pula sebaliknya kesulitan masalah bidang ekonomi tidak dapat dilepaskan dari penyelesaian masalah bidang politik dan hukum. Sebagai pengendalian pelaksanaan reformasi tolak ukurnya adalah Pancasila dan UUD 1945 dengan tetap mempertahankan integritas, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Dalam rangka menyikapi reformasi yang sedang berlangsung dewasa ini Polri dituntut untuk mampu memainkan perannya secara optimal dalam rangka mewujudkan stabilitas kamtibmas yang kondusif demi tersegelenggaranya reformasi menyeluruh. Untuk mewujudkan stabilitas kamtibmas yang kondusif diperlukan tegaknya hukum yang ditopang oleh aparat yang profesional, bersih dan berwibawa. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Polri perlu pembenaan-pembenahan guna mewujudkan Polri yang profesional, efektif, efisien dan modern dengan melakukan langkah kegiatan sebagai berikut:

Polri dituntut untuk mampu memainkan perannya secara optimal



- nal, bersih dan berwibawa sehingga kehadirannya selalu dibutuhkan dan dicintai masyarakat.
- c. Pengembangan organisasi yang menuju kemandirian guna mewujudkan Polri yang profesional, efektif, efisien dan modern sehingga mampu mengantisipasi beban tugas yang semakin kompleks dan multi dimensial pada era reformasi ini.
 - d. Memantapkan manajemen dan kepemimpinan Polri dengan menerapkan manajemen modern secara efektif dan efisien sehingga mampu merubah kebiasaan reaktif ke arah pelaksanaan tugas yang antisipatif dan proaktif.
 - e. Meningkatkan kesejahteraan anggota Polri agar pelaksanaan tugasnya memadahi seiring dengan perubahan nilai-nilai sosial dalam masyarakat.
 - f. Meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian secara berjenjang di semua lini organisasi kepolisian.

Keluar

- a. Meningkatkan pembinaan kesadaran hukum masyarakat untuk mencegah timbulnya kolusi dan penyimpangan hukum dalam tubuh Polri serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan siskamtibmas swakarsa



Pengembangan organisasi yang menuju kemandirian guna mewujudkan Polri yang profesional, efektif, efisien dan modern sehingga mampu mengantisipasi beban tugas yang semakin kompleks dan multi dimensial pada era reformasi ini.

- d. Meningkatkan kerja sama internasional melalui Interpol.
- e. Memberdayakan tokoh-tokoh masyarakat dengan segala potensinya dan juga merupakan bagian dari kekuatan proses reformasi untuk mewujudkan stabilitas kamtibmas yang dinamis agar proses reformasi dapat berjalan lancar, aman dan damai.

Peran Polri dalam reformasi menyeluruh pada dasarnya mengoptimalkan peran Polri secara umum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dihadapkan dinamika reformasi. Peran Polri dalam reformasi menyeluruh adalah sebagai berikut:

2. Meneberantas kolusi dan nepotisme
 3. Meningkatkan penyidikan tindak pidana politik.
- b. Sebagai pembina ketentraman masyarakat.
1. Meningkatkan pembinaan Dalmas dan PHH dengan melakukan latihan-latihan dan drill-drill secara efektif.
 2. Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan penindakan terhadap unjuk rasa, demonstrasi dan huru-hara bahkan pemberontakan bersenjata.
- c. Sebagai penyayom dan pelindung masyarakat.
1. Meningkatkan pengayoman dan perlindungan masyarakat berdsarkan asas legalitas dan asas oportunitas.
 2. Meningkatkan pemberian pertolongan

dan penyelamatan masyarakat yang membutuhkan bantuan Polri.

- d. Sebagai pelayan masyarakat.
1. Meningkatkan pelayanan dalam pemberian izin kegiatan politik.
 2. Meningkatkan pelayanan terhadap kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan politik demi kelancaran, keamanan dan ketertiban.
 3. Memberikan pelayanan terhadap kegiatan masyarakat sebagai korban dampak reformasi bidang politik.
- e. Sebagai pembimbing masyarakat.
1. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk memahami dan menyadari akan hak dan kewajibannya di bidang politik dan mampu mempergunakannya secara baik dan benar.
 2. Meningkatkan siskamling dalam rangka siskam swakarsa.
- f. Sebagai kekuatan Sosial Politik ABRI.
1. Memberikan masukan, saran dan pendapat kepada eksekutif guna mewujudkan aparat pemerintah yang bersih dan berwibawa.
 2. Memberikan masukan, saran dan pendapat kepada legislatif demi penyempurnaan dan pembaharuan hukum

Peran Polri dalam reformasi bidang ekonomi antara lain, sebagai alat negara penegak hukum, meningkatkan kemampuan penyidikan tindak pidana ekonomi, meningkatkan kemampuan penyidikan

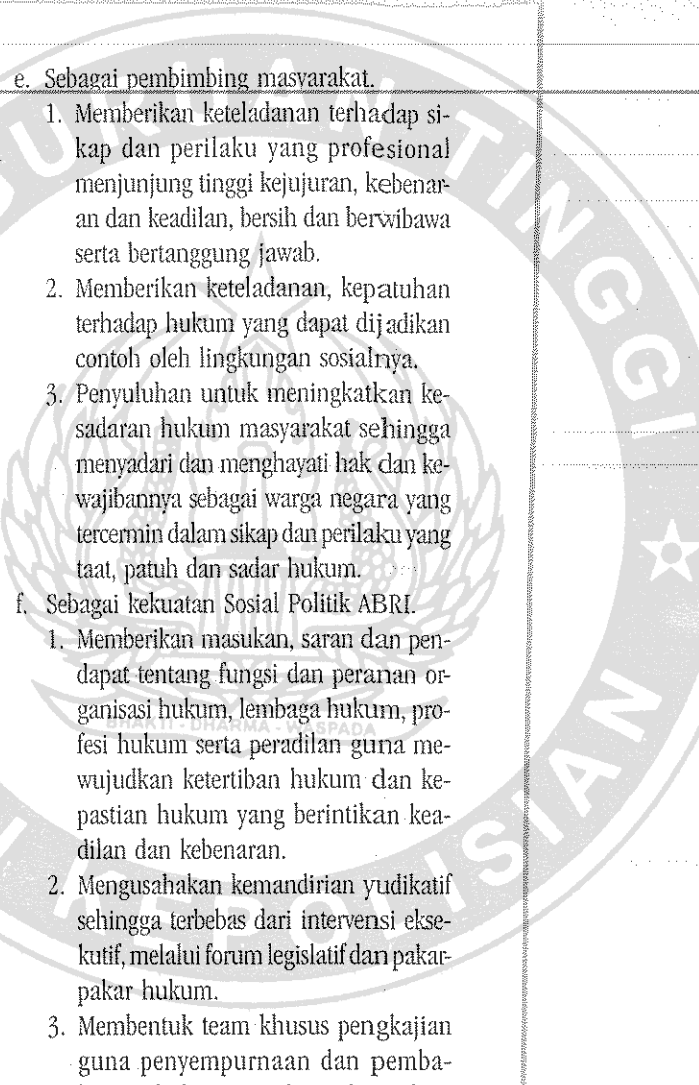


2. Meningkatkan kemampuan penyidikan terhadap semua tindak pidana sebagai akibat tekanan ekonomi dan kebutuhan hidup yang semakin berat.
 3. Menindak penghambat kelancaran penyaluran perekonomian terutama penyaluran sembako.
- b. Sebagai pembina ketentraman masyarakat.
1. Meningkatkan kemampuan fungsi-fungsi pencegahan.
 2. Meningkatkan kegiatan pembinaan dan operasional Dalmas dan PHH.
- c. Sebagai penyayom dan pelindung masyarakat.
1. Melindungi dari segala kemungkinan yang bakal mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagai dampak negatif krisis ekonomi.
 2. Mencegah dan meniadakan segala bentuk kesulitan masyarakat.
- d. Sebagai pelayan masyarakat.
1. Memperlancar jalannya pendistribusian barang.
 2. Membantu operasi pasar agar sembako mudah didapatkan dengan harga terkendali dan terjangkau masyarakat.
 3. Mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat



Sebagai pembimbing masyarakat Polri memberikan keteladanan dalam menerapkan pola hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari.

- e. Sebagai pembimbing masyarakat.
1. Memberikan keteladanan dalam menerapkan pola hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
 2. Menyelenggarakan Bimmas Pionir di bidang pertanian dalam rangka membuka lahan tidur sekaligus meningkatkan lapangan kerja guna mengatasi pengangguran dan kemiskinan.
 3. Menggalakkan siskamling dalam rangka siskam swakarsa.
- f. Sebagai kekuatan Sosial Politik ABRI.
1. Memberikan masukan, saran dan pendapat kepada eksekutif guna penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan kesejahteraan rakyat

- 
1. Meningkatkan pelaksanaan penegakan hukum secara tegas, lugas tetapi manusiawi, konsekuen, konsisten dan tidak diskriminatif.
 2. Meningkatkan kemampuan profesional penyidikan agar mampu mewujudkan tertib hukum.
 3. Meningkatkan forum antar instansi terkait dalam rangka efektivitas penerapan hukum (CJS).
 4. Pengembangan organisasi kepolisian untuk kemandirian sehingga sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya.
- b. Sebagai pembina ketentraman masyarakat.
1. Meningkatkan tertib sosial dan disiplin nasional dalam kehidupan masyarakat.
 2. Memelihara dan meningkatkan stabilitas kamtibmas yang mantap dan terkendali.
- c. Sebagai pengayom dan pelindung masyarakat.
1. Memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat pencari keadilan.
 2. Meningkatkan kemampuan penertiban dan penyelamatan serta pengamanan masyarakat agar terbebas dari rasa kekhawatiran, kecemasan terhadap gangguan kamtibmas.
- d. Sebagai pelayan masyarakat.
- e. Sebagai pembimbing masyarakat.
1. Memberikan keteladanan terhadap sikap dan perilaku yang profesional menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran dan keadilan, bersih dan berwibawa serta bertanggung jawab.
 2. Memberikan keteladanan, kepatuhan terhadap hukum yang dapat dijadikan contoh oleh lingkungan sosialnya.
 3. Penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang taat, patuh dan sadar hukum.
- f. Sebagai kekuatan Sosial Politik ABRI.
1. Memberikan masukan, saran dan pendapat tentang fungsi dan peranan organisasi hukum, lembaga hukum, profesi hukum serta peradilan guna mewujudkan ketertiban hukum dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.
 2. Mengusahakan kemandirian yudikatif sehingga terbebas dari intervensi eksekutif, melalui forum legislatif dan pakar hukum.
 3. Membentuk team khusus pengkajian guna penyempurnaan dan pembaharuan hukum yang bersanksi pidana